ANALISIS KETERKAITAN ANTARA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN TERPILIHNYA BUPATI SABU RAIJUA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

RISKI

10200120151

HUKUM TATA NEGARA (D)

ABSTRAK

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya di hubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Mahkamah konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945. memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, warga masyarakat untuk memberikan keterangan. dalam menangani kasus kewarganegaraan ganda dalam ini kita perlu mengetahui apaitu kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang di sematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. Orang yang memiliki kewarganegaraan ganda di mana orang keturunan negara A (lus sanguinis) dan lahir di negara B (lus soli). karena seseorang tersebut adalah keturunan dari negara A, maka di anggap sebagai warga negara A. namun orang tersebut juga di anggap warga negara B.

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Status kewarganegaraan bupati sabu raijua terpilih orient patriot riwu kore belakangan menarik perhatian banyak pihak. Sebab orient di ketahui memiliki paspor amerika serikat (as). Namun ia juga tercatat sebagai warga negara indonesia (wni) dan memiliki dokumen kependudukan seperti paspor e-KTP. Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan gugur.

PP nomor 2 tahun 2007 pasal 31 ayat 1 huruf g, demikian juga di UU kewarganegaraan di pasal 23 huruf H. kalau negara lain seperti AS mengakui dwikewarganegaraan

Dalam pasal 23 huruf h UU kewarganegaraan, salah satu hal membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena, mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari lain atas namanya. Sementara peraturan paling tinggi tentang kewarganegaraan indonesia adalah UU nomor 12/2006 di mana pada pasal 23 huruf h UU nomor 12/2006 di katakan bahwa warga negara indonesia kehilangan hak kewarganegaraan indonesia-nya jika memiliki kartu identitas resmi dari negara lain. terkait alternatif pembatalan keterpilihan riwu kore sebagai bupati terpilih sabu raijua, dia mengatakan ada tiga hal yang dapat berkembang dalam diskusi.

Pertama belum ada dasar hukum bagai kepala daerah, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon.

Kedua apabila keterpilihan riwu kore sebagai bupati sabu raijua dibatalkan, maka akan muncul pertanyaan terkait institusi yang berwenang membatalkan.

Pertanyaannya hukumnya adalah apabila seorang calon yang sudah ditetapkan kemudian dibatalkan, lembaga mana yang berwenang untuk membatalkannya? apakah badan pengawas pemilu, KPU atau kementerian dalam negeri? Itu juga persoalan hukum yang harus kami lihat.

Ketiga dalam kasus pilkada sabu raijua itu muncul pembahasan terkait siapa yang akan dibatalkan apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati terpilih. Lalu kalau ada kemungkinan dibatalkan dan ada lembaga yang berwenang membatalkan, siapa yang dibatalkan? apakah salah satu pasangan atau kedua-duanya dapat dibatalkan?

Orient riwu kore yang terpilih menjadi bupati sabu raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat, pada saat dia mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Orient maju dalam pilkada kabupaten sabu raijua 2020 bersama thobias uly sebagai calon bupati, dengan mendapat dukungan dari partai Demokrat PDI Perjuangan dan Partai Gerindra¹.

II. RUMUSAN MASALAH

- A. Mengapa semua pihak diminta patuhi putusan MK dalam pilkada sabu raijua
- B. Mengapa MK batalan kemenangan bupati terpilih sabu raijua
- C. Apa pembelajaran politik dari pilkada sabu raijua?

METODE PENELITIAN

Metode adalah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian. Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis yang dilakukan dengan berbagai sumber data yang ada. Penelitian hukum normatif (legal research) menjadi pilihan untuk analisa data sekunder yang berupa keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas dan teori-teori hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum².

PEMBAHASAN

A. PILKADA SABU RAIJUA, SEMUA PIHAK DIMINTA PATUHI PUTUSAN MK

Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) meminta semua pihak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 2, sebagai peserta pemilihan bupati (pilbup) sabu raijua. sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat.

¹ <https://nasional.tempo.co>

² Abdul Latif, Penelitian Hukum Normatif

“sudah tidak ada ruang untuk banding atas putusan MK tersebut,” ujar direktur eksekutif perludem khoirunnisa agustiyati kepada republika, senin(19/4).

Terkait pernyataan yang di lontarkan politikus PDIP junimart girsang yang akan menggugat putusan MK ke pengadilan negeri dengan dalih perbuatan melawan hukum, menurut khoirunnisa, hal itu karena kemungkinan partai tidak puas atas putusan MK terhadap calon yang di usungnya.” mungkin karena tidak puas atas putusan MK yang mendiskualifikasi paslon yang diusung partai tersebut”.

Perludem mendesak semua pihak memiliki itikad baik mematuhi dan melaksanakan putusan MK, serta tidak melakukan upaya di luar mekanisme penegakan hukum pemilu yang sudah ada. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya persoalan terkait perselisihan hasil pilkada bermuara di MK dan selesai ketika MK sudah memutuskan.

Khoirunnisa mengatakan, upaya-upaya di luar sistem penegakan hukum pemilu yang sudah di rancang oleh pembentuk undang-undang, hanya akan memberikan ketidakpastian hukum. Hal ini juga dapat merusak sistem penegakan hukum pemilu dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Di samping itu, komisi pemilihan umum (KPU) menegaskan siap menjalankan putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil pilkada sabu rajua. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan KPU kabupaten sabu rajua melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dengan tidak menyertakan orient patriot riwu kore thobias uly.

“Tentu saja kami akan melaksanakan putusan MK tersebut sesuai dengan apa yang di putusan mahkamah konstitusi,” ujar ketua KPU RI ilham saputra, senin.

Dengan demikian, PSU hanya diikuti paslon nomor urut 1 Nikodemes N Rihi Heke-yohanis uly kale dan paslon nomor urut 3 taken radja pono-herman hegi radja haba. KPU RI telah menggelar rapat bersama KPU Provinsi nusa tenggara timur (NTT) dan KPU sabu rajua untuk menelaah putusan MK dalam pelaksanaannya secara teknis.

KPU RI dan KPU provinsi NTT bertugas melakukan supervisi kepada KPU kabupaten sabu rajua sebagai penyelenggara PSU. KPU bertanggung jawab memastikan rancangan tahapan, program, dan jadwal PSU, ketersediaan anggaran, penyediaan logistik pemilihan, serta memetakan wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Khususnya terhadap keberadaan pemilih di wilayah sabu rajua pascabencana alam yang berakibat tempat pemungutan suara (TPS) tidak dapat di bentuk di tempat semula. Selain itu, pemilih pun juga di evakuasi di tempat tertentu yang tidak mungkin lagi akan memberikan suara di TPS semula.

“saat ini sedang menghimpun kira-kira apakah pengungsi, jika ada tentu ada peraturan khusus terkait dengan keikutsertaan mereka dalam PSU nanti” kata ilham.

KPU meminta KPU provinsi NTT serta KPU kabupaten sabu rajua melaksanakan sosialisasi serta rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah

daerah, pengawas pemilu, serta aparat keamanan. KPU sabu raijua diminta menentukan tanggal PSU dengan memperhatikan putusan MK.

MK memerintahkan agar PSU di laksanakan paling lambat 60 hari kerja sejak putusan di ucapkan. KPU juga mengimbau semua pihak dapat berpartisipasi dalam menyukseskan PSU di kabupaten sabu raijua³.

B. TERBUKTI WARGA AMERIKA SERIKAT, MK BATALKAN KEMENANGAN BUPATI TERPILIH SABU RAIJUA

Mahkamah konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan yang di ajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 taken irianto radja pono dan herman hegi radja haba. dalam amar putusan MK no.135/PHP.BUP-VIX/2021 yang dibacakan, Kamis (15/4/2021), MK mendiskualifikasi atau membatalkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 orient patriot riwu kore dan thobias uly dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020, nusa tenggara timur, lantaran orient memiliki dwi kewarganegaraan.

Dalam amar putusan yang di bacakan ketua MK anwar usman, MK membatalkan empat keputusan KPU kabupaten sabu raijua (termohon). Pertama keputusan nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 desember 2020. Kedua, MK membatalkan keputusan KPU kabupaten sabu raijua nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai pemilihan bupati dan wakil bupati sabu raijua tahun 2020 bertanggal 23 september 2020. Ketiga, MK membatalkan keputusan KPU kabupaten sabu raijua nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati sabu raijua tahun 2020 bertanggal 24 september 2020, sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut 2 (orient patriot riwu kore dan thobias uly). Keempat, MK membatalkan keputusan KPU kabupaten sabu raijua nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sabu raijua tahun 2020 bertanggal 23 januari 2021.

Hal terpenting, MK pun memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020 dengan ikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1 nikodemus N. Rihi heke dan yohanis uly kale serta pasangan calon nomor urut 3 taken radja pono dan herman hegi radja haba. MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut di lakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Miliki dua paspor

Dalam pertimbangannya yang di bacakan hakim konstitusi saldi isra, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa orient patriot riwu kore mempunyai dua paspor. Dua paspor tersebut yaitu paspor republik indonesia nomor X746666 yang berlaku 1 april 2019 sampai dengan 1 april 2024 sesuai keterangan ditjen imigrasi kemenkumham dan paspor amerika serikat nomot 574900485 yang berlaku 10 juli 2017 sampai dengan 9 juli 2027.

³ <https://www.republika.co.id/berita/qrsu4sabu-raijua-semua-pihak-diminta-patuhi-putusan-mk>

Bahkan sebelumnya orient patriot riwu kore memegang paspor amerika serikat nomor 430562714 uang berlaku 11 agustus 2017 ujar saldi saat membacakan pertimbangan putusan.

Menurut mahkamah, kepemilikan paspor amerika serikat atau paspor negara asing lainnya, jika merujuk pasal 23 huruf h jo huruf a dan huruf b UU no.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, membawa konsekuensi bahwa orient patriot riwu kore seharusnya secara serta merta (otomatis) kehilangan statusnya sebagai warga negara indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan.

Karena memiliki paspor amerika serikat, membawa konsekuensi bahwa orient patriot riwu kore seharusnya secara serta merta kehilangan statusnya sebagai warga negara indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan sesuai UU kewarganegaraan RI.

Terlebih, di terbitkan paspor amerika serikat atas nama orient patriot riwu kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor amerika serikat sebelumnya yang berlaku hingga pada 2017. Terbitnya paspor tersebut menurut mahkamah meneguhkan satu yang bersangkutan sebagai warga negara amerika serikat. Kata saldi

Setelah terbitnya paspor amerika serikat, orient memperoleh paspor republik indonesia yang berlaku sejak 2019 hingga 2024. Selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upayanya memperoleh paspor republik indonesia, kepada petugas konsulat jenderal republik indonesia (KJRI) di los angeles, orient patriot riwu kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor amerika serikat.

Informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI di los angeles menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) atas nama orient patriot riwu kore, dengan status sebagai WNI, sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah indonesia dengan tujuan mengurus paspor republik indonesia.

Orient masuk ke indonesia mempergunakan SPLP tersebut dan dapat di jadikan dasar pengajuan pembuatan paspor republik indonesia yang baru di kantor imigrasi jakarta selatan. Dalam persidangan terungkap orient menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi jakarta selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di los angeles.

Perbedaan alasan orient kepada KJRI los angeles adalah green card miliknya sudah habis masa berlakunya pada 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan. Hal berbeda diutarakan orient kepada kantor imigrasi jakarta selatan yang beralasan paspor republik indonesia yang dimilikinya telah hilang.

Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa orient patriot riwu kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon bupati kabupaten sabu raijua dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada 5 agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan amerika serikat hal demikian tidak secara terus terang di sampaikan kepada termohon.

Warga negara AS

Berdasarkan UU 12/2006 yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, mahkamah berpendapat status orient sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah warga negara amerika serikat (AS). status demikian juga di pertegas dengan jawaban email dari kedutaan besar amerika serikat di jakarta kepada bawaslu kabupaten sabu raijua dan nota diplomatik(diplomatic note) nomor 00709, bertanggal 10 februari 2021.

(nota diplomatik) yang di sampaikan oleh kedutaan besar amerika serikat kepada kementrian luar negeri RI yang menyatakan (kedutaan besar dapat mengkonfirmasi kepada kementrian luar negeri RI dan bawaslu RI bahwa tuan riwukore merupakan warga negara amerika serikat). Dokumen tersebut menjadi bukti yang di sampaikan dalam persidangan.terang saldi

Mahkamah mengingatkan syarat warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai warga negara indonesia. Indonesia menganut sistem(stelsel) kewarganegaraan tunggal ,sehingga warga negara indonesia tidak di benarkan melekat status kewarganegaraan lain.

Karena orient patriot riwu kore memiliki paspor amerika serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara amerika serikat ,sehingga tidak memenuhi syarat warga negara(sebagaimana di atur dalam pasal 7 UU 10/2016)untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020.

Mahkamah berpendapat batalnya pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020,sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih ,telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian,menurut mahkamah,tidak dapat begitu saja di isi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Mengingat perolehan suara(yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon.

Dengan pertimbangan demikian,demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin kabupaten sabu raijua , maka mahkamah berpendapat harus di laksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020.

Pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu raijua tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon nomor urut 1 nikodemus n. Rihi heke dan yohanis uly kale,dan pasangan calon nomor urut 3 taken radja pono dan herman hegi radja haba.

Sebelumnya pemohon meminta mahkamah membatalkan surat keputusan komisi pemilihan umum(KPU)kabupaten sabu raijua nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sabu raijua tahun 2020 bertanggal 23 januari 2020. Menurutnya keputusan tersebut tidak lahir dengan sendirinya karena telah ada proses dan tahapan yang dilalui sebelumnya.

Berpedoman dari surat konsul jenderal kedutaan besar amerika serikat di indonesia bertanggal 1 februari 2021,dinyatakan benar adanya jika orient patriot R.K berkewarganegaraan amerika serikat

. surat tersebut merupakan jawaban atas surat bawaslu sabu raijua nomor 136/K.bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020. Karena itu, secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon bupati menjadi cacat hukum.

Untuk di ketahui ,orient maju dalam pilkada kabupaten sabu raijua 2020 bersama thobias uly sebagai calon bupati, dengan mendapat dukungan dari partai demokrat,PDI perjuangan,dan partai gerindra. Orient patriot-thobias uky memenangi pilkada dengan perolehan suara 48,3 persen,mengalahkan pasangan nikodemus N rihi heke-yohanis uly kale dengan 30,1 persen suara dan pasangan takem irianto radja pono-herman hegi radja haba dengan 21,6 persen suara⁴.

C.PEMBELAJARAN POLITIK DARI PILKADA SABU RAIJUA

Mahkamah konstitusi(MK) pada kamis ,(15/4)memutuskan mendiskualifikasi pasangan orient patriot riwu kore-thobias uly sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pilkada sabu raijua,provinsi nusa tenggara timur(NTT).

Keputusan ini di bacakan dalam sidang otusan perkara 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang permohonannya diajukan oleh pasangan calon nomor urut tiga takem irianto radja pono-herman hehi radja haba dalam pikada sabu raijua.

Dalam gugatan itu ,pemohon menganggap pemilihan bupati dan wakil bupati sabu raijua cacat formil mulai dari proses pendaftaran pasangan calon.

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.menyatakan batal keputusan KPU kabupaten sabu raijua. Menyatakan diskualifikasi paslon sabu raijua orient riwu kore-thobias uly,demikian ketua MK anwar usman saat membacakan putusan MK di gedung MK,kamis(15/5)

Berdasarkan bukti yang di kumpulkan,MK mengatakan status orient riwu kore sejak 2007 adalah warga negara amerika serikat. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan paspor AS.

Jika mengacu pada UU nomor 12 tahun 2006,indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal ,sehingga saat orient mempunyai paspor AS saat itu pula secara otomatis status WNI tidak berlaku.

Selain itu,mengacu pada pasal 7 ayat(1) UUD nomor 10 tahun 2016 terkait persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati mengharuskan berstatus WNI sehingga pencalonan orient tidak dapat di terima.

MK menganggap orient riwu kore tidak jujur terhadap status kewarganegaraannya selama ini.

Status orient Riwu Kore tidak jujur terhadap status kewarganegaraannya selama ini. Namun gugurnya Orient Thobias Uly tidak otomatis pasangan bupati dan wakil bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak kedua menang.

MK menjelaskan KPU harus menggelar pilkada ulang dengan diikuti dua pasangan calon dalam batas waktu yang ditetapkan selama 60 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkama. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan segera mengeksekusi putusan mahkamah konsultasi (MK).

⁴ <https://jurnal.hukumonline.com>

KPU RI terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan KPU provinsi NTT dan sabu Raijua untuk membahas teknis pelaksanaan. Ilham berharap seluruh pihak baik masyarakat maupun penyelenggara pemilu di NTT dan kabupaten Sabu Raijua bisa berpartisipasi aktif guna menyukseskan pelaksanaan PSU pilkada sabu raiju.

Terobosan hukum sejak awal kami sudah yakin kalau MK akan mengambil keputusan demikian, dengan fakta-fakta yang tersaji selama persidangan tidaklah dapat dipungkiri lagi, ujar kuasa hukum pasangan calon bupati-wakil bupati sabu raijua no urut 1 Nikodemus dan Yohanis selaku pemohon,adhitya anugrah nasution.

Dengan di batalkannya kemenangan orient maka saya berpendapat MK sudah melakukan tindakan yang tepat demi kepastian hukum di indonesia,kata nasution.

Menurut dia putusan ini sebagai bentuk terobosan hukum varu MK yang sangat bermanfaat bagi pilkada di masa yang akan datang.

Tidak ada kekosongan hukum lagi untuk perkara sejenis di kemudian hari . MK sudah melakukan terobosan hukum yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, katanya.

Saya mewakili sebagian masyarakat sabu raijua mengucapkan terima kasih kepada ketua mahkamah konstitusi RI beserta seluruh hakim anggotanya yang telah memberikan keadilan dan kepastian hukum atas polemik demokrasi yang sempat terjadi di kabupaten sabu raijua,katanya.

Surat elektronik

Polemik pilkada sabu raijua ini bermula(bawaslu) sabu raijua menerima surat elektronik dari kedutaan besar amerika serikat pada 1 februari 2021 lalu.

Dalam surat balasan atas permintaan bawaslu sabu raijua itu, kedutaan besar amerika serikat menyebutkan bahwa orient riwu kore merupakan warga negaranya.

Padahal pasangan orient riwu kore-thobias uly telah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih oleh komisi pemilihan umum dalam pilkada serentak sabu raijua pada 9 desember 2020.

Pasangan orient-thobias yang diusung PDI perjuangan,demokrasi dan gerindra ini meraih 21.359 suara atau 48,3 persen,sekaligus menumbangkan petahana nikodemus rihi heke-yohanis yang hanya meraih 13.292 atau 30,1 persen.

Sementara paslon takem irianto radja pono-herman radja pono meraih 9.569 suara atau 21,6 persen.

Sengkarut pilkada sabu raijua akhirnya digugat ke mahkamah konstitusi(MK).

Keputusan MK ini tentu meninggalkan rasa perih yang mendalam bagi pasangan calon dan mereka yang telah berjuang dan menghabiskan banyak energi untuk memenangkan proses demokrasi lima tahunan di sabu raijua.

Namun juga menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi anak negeri ini, agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.⁵

KESIMPULAN

Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi(perludem) meminta semua pihak mematuhi putusan mahkamah konstitusi(MK) yang mendiskualifikasi pasangan calon(paslon) nomor urut 2, sebagai peserta pemilihan bupati(pilbup) sabu rajua . sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat. “sudah tidak ada ruang untuk banding atas putusan MK tersebut,” ujar direktur eksekutif perludem khoirunnisa agustyati kepada republika, senin(19/4).

Hal terpenting, MK pun memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sabu rajua tahun 2020 dengan ikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1 nikodemus N. Rihi heke dan yohanis uly kale serta pasangan calon nomor urut 3 taken radja pono dan herman hegi radja haba. MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam gugatan itu, pemohon menganggap pemilihan bupati dan wakil bupati sabu rajua cacat formil mulai dari proses pendaftaran pasangan calon.

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. menyatakan batal keputusan KPU kabupaten sabu rajua. Menyatakan diskualifikasi paslon sabu rajua orient riwu kore-thobias uly, demikian ketua MK anwar usman saat membacakan putusan MK di gedung MK, kamis(15/5)

Berdasarkan bukti yang di kumpulkan, MK mengatakan status orient riwu kore sejak 2007 adalah warga negara amerika serikat. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan paspor AS.

Jika mengacu pada UU nomor 12 tahun 2006, indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, sehingga saat orient mempunyai paspor AS saat itu pula secara otomatis status WNI tidak berlaku.

⁵ <https://www.antarnews.com>